

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ternyata tata kelola pendidikan inklusi Kabupaten Banyumas telah berjalan sesuai dengan peraturan walaupun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. secara lebih rinci, hasil dari tata kelola pendidikan inklusi di SDN 05 Arcawinangun dan SDN Watujaran adalah sebagai berikut :

##### **1. Partisipasi dalam kegiatan pendidikan inklusi**

Partisipasi wali murid dalam pendidikan inklusi tidak sepenuhnya wali murid mengikuti semua kegiatan sekolah, wali murid memberikan kebebasan dalam proses belajar mengajar kepada sekolah. Peran wali murid hanya dilingkungan rumah sedangkan di sekolah wali murid tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa. Interaksi antara wali murid dengan sekolah berjalan dengan baik adanya komunikasi yang baik antara wali murid dengan guru.

##### **2. Transparansi dalam kegiatan pendidikan inklusi**

SDN 05 Arcawinangun dan SDN Watujaran sangat responsive dalam menanggapi wali murid. Sekolah telah terbuka menyampaikan semua kegiatan belajar mengajar yang di laksanakan di sekolah dan sekolah transparan dalam anggaran yang diberikan oleh wali murid,

kepada sekolah akan di paparkan dalam forum untuk membeli kebutuhan-kebutuhan untuk siswa. Namun sumber anggaran tidak semua dijelaskan secara merinci hanya anggaran iuran dari wali murid. Untuk perlengkapan dan peralatan masih sangat terbatas tidak semua sekolah memiliki perlengkapan dan peralatan. Tidak ada pengaduan dalam bentuk sosial media yang bisa di akses oleh semua orang.

### 3. Akuntabilitas dalam pendidikan inklusi

SDN 05 Arcawinangun dan SDN Watujaran telah secara terbuka menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa dan wali murid. Sekolah telah terbuka menyampaikan transparansi dalam proses belajar mengajar maupun anggran yang diberikan dari wali murid kepada sekolah dimana wali murid dapat mengawasi proses belajar mengajar di seklolah. Wali murid dapat memberikan saran dan kritikan terhadap sekolah secara langsung maupun melalui media seperti whatsapp secara langsung kepada wali kelas masing-masing. Tidak adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah khusus untuk pendidikan inklusi.

Dalam menjalankan kebijakan pendidikan inklusi di setiap sekolah menurut perspektif partisipas, transparan dan akuntabilitas sudah berjalan namun masih banyak kekurangan karena sekolah dalam administrasi tidak semua di sampaikan kepada wali murid.

## B. Implikasi

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, untuk menindaklanjuti hasil penelitian dapat di rumuskan implikasi sebagai berikut :

1. Karena kurangnya partisipasi dari wali murid terhadap pendidikan inklusi disekolah, menyebabkan kurang pahamnya orang tua terhadap pendidikan inklusi, oleh karenanya cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah adanya sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman orang tua mengenai ABK dan pendidikan inklusi.
2. Komunikasi antara wali murid dengan guru telah terjalin sangat bagus. Wali murid merasa bahwa kebutuhan pelayanan cepat ditanggapi oleh sekolah. Dengan demikian pihak sekolah perlu mempertahankan ataupun meningkatkan komunikasi dengan wali murid agar kerjasama antara guru dengan wali murid bisa berjalan baik.
3. Perbaikan dari segi peraturan yang jelas. Sebaiknya pemerintah daerah membuat secara tertulis peraturan dalam hal sekolah reguler menjadi sekolah inklusi.
4. Berdasarkan aspek masalah yang ada yaitu anggaran yang terbatas, sarana dan prasarana dari segi kelengkapan dan jumlahnya perlu di tingkatkan lagi atau adanya penambahan untuk anggaran. Seharusnya pemerintah menganggarkan dana khusus untuk pendidikan inklusi di setiap sekolah untuk membeli keperluan belajar Anak Berkebutuhan Khusus.
5. Penyampaian kegiatan dan perkembangan anak dilakukan baik, namun penyampaian administrasi kurang di sampaikan sehingga wali murid tidak

mengetahui sepenuhnya administrasi di sekolah. Komunikasi harus terjalin dengan baik dalam segi kegiatan maupun penyampaian administrasi kepada wali murid yaitu dengan mengadakan perkumpulan rutin antara guru dan wali murid.

6. Evaluasi untuk pendidikan inklusi masih belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah daerah yang telah menerapkan pendidikan inklusi di setiap sekolah menegaskan adanya evaluasi secara rutin untuk pendidikan inklusi.

